

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU Nomor No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun anggaran 2001 merupakan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan hasil penelitian serta evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD), hanya beberapa daerah yang tergolong kaya yang mampu membiayai sendiri proyek-proyek pembangunannya.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 4 Nomor 106 Tahun 2000 yang

menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2008).

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari

apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Nugroho, 2012).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Berikut adalah Tabel Laporan Keuangan Kabupaten Kupang tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Kegiatan	Target Pendapatan (Rp Juta)	Realisasi Pendapatan (Rp Juta)	Kekurangan/Kelebihan
2015	Keseluruhan pendapatan	1,094,275	1,068,039	26.236
	PAD	62,623	67,270	-4.647
	Belanja Daerah	1,253,921	909,247	344.674
2016	Keseluruhan pendapatan	1,218,620	1,170,495	48.125
	PAD	98,635	73,214	25.421
	Belanja Daerah	1,536,088	1,379,301	156.787
2017	Keseluruhan pendapatan	1,208,804	1,141,043	67.761
	PAD	142,012	119,098	22.914
	Belanja Daerah	1,308,488	1,220,116	88.372
2018	Keseluruhan pendapatan	1,489,939	1,442,207	47.732
	PAD	85,244	66,182	19.062
	Belanja Daerah	1,530,830	1,277,942	252.888
2019	Keseluruhan pendapatan	1,296,926	1,001,520	295.406
	PAD	87,416	42,987	44.429
	Belanja Daerah	1,335,121	841,377	493.744

Sumber: Kabupaten Kupang, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dilihat dari target Keseluruhan pendapatan, PAD dan Belanja Daerah memiliki

kekurangan dari realisasi yang diterima, terutama pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.530.830,00 dan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp. 1.001.520,00. Hal ini dapat mengganggu kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu perlu diperhatikan kembali oleh pihak pemerintah Kabupaten Kupang agar kinerja keuangan tersebut menjadi lebih baik.

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah, ada beberapa rasio yang bisa digunakan diantaranya adalah rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh, 2015 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011-2014 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun). Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun).

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Sardio Kartopawiro dan Yohanes Susanto, 2018 dengan judul “Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja kualitas Pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musirawas secara simultan dipengaruhi oleh Kompetensi sumber daya aparatur, Motivasi aparatur dan didukung oleh sistem akuntansi keuangan daerah, namun secara parsial kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat kompetensi aparatur yang mampu menguasai teknis pengelolaan keuangan daerah, dan disarankan untuk mewujudkan kualitas pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah peran sumber daya aparatur memegang peranan penting dan sistem pengawasan yang efektif harus dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul, “**Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kupang**”

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2019.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi?
- b. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
- c. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
- d. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
- e. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Keserasian?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian, dari hasil penelitian dimaksud antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang yang dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
- b. Untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang yang dilihat dari Rasio Rasio Kemandirian.
- c. Untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang yang dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
- d. Untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang yang dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

- e. Untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang yang dilihat dari Rasio Keserasian.

2. Manfaat Penelitian:

Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan daerah tentang Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kupang berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kupang.